KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Genjot Kas Negara, saatnya tertibkan tambang ilegal
Tanggal : Rabu, 01 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Genjot Kas Negara

Saatnya Tertibkan Tambang Ilegal



Jamaludin Malik

SENAYAN mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menindak pertambangan ilegal di sejumlah daerah. Sebab aktivitas pertambangan tersebut berakibat kepada kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar dan kerusakan lingkungan.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik mengatakan, langkah Presiden Prabowo memperingatkan dan menertibkan pertambangan ilegal disejumlah daerah sangat tepat. DPR akan berdiri di belakang Pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

"Tujuannya agar sumber daya alam (SDA) benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," tegas Jamaludin dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI/Polri dan Bea Cukai untuk membersihkan kegiatan pertambangan ilegal, baik timah, batu bara, bauksit dan nikel. Ke depan, pertambangan ilegal itu akan diambil alih oleh negara.

"Kita perkirakan bulan September hingga Desember, bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun," tegas Prabowo dalam acara Munas PKS di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Jamaludin melanjutkan, data yang terungkap di berbagai kasus menunjukkan bahwa kerugian negara akibat pertambangan ilegal sudah mencapai skala luar biasa. Di sektor timah, kerugian negara mencapai Rp 300 triliun sepanjang tahun 2015–2022.

"Sekitar Rp 271 triliun merupakan kerugian lingkungan akibat kerusakan kawasan hutan dan non-kawasan," sebut Jamaludin.

Di sektor lain, lanjutnya, pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat (Kalbar), kerugian negara mencapai Rp 1,02 triliun hanya dari satu wilayah. Secara nasional, Pemerintah memperkirakan kerugian akibat praktik pertambangan ilegal bisa mencapai Rp 300 triliun per tahun dari potensi pajak, royalti, dan kewajiban negara yang tidak disetorkan.

"Jamaludin menyebut, pertambangan ilegal memukul dua hal sekaligus, yaitu keuangan negara dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan praktik seperti ini terus berjalan.

Komisi XII DPR, lanjutnya, akan mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda), aparat penegak hukum, serta kementerian/lembaga terkait, agar penertiban bisa berjalan sistematis. Termasuk di dalamnya penguatan data perizinan, pengawasan lapangan, hingga regulasi yang memungkinkan penyitaan aset tambang ilegal untuk dikembalikan kepada negara.

"Kita ingin memastikan bahwa tata kelola pertambangan nasional berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," tegas politikus Golkar ini. ■ TIF